

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam pidato pembukaan di Anjong Mon Mata (Kompleks Pendopo Gubernur Aceh), yang dihadiri oleh peneliti dalam rangka mengikuti kegiatan Internalisasi Nilai-nilai Kebangsaan (Inti Bangsa) dan Lawatan Sejarah Nasional (Lasenas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang dari tanggal 27 April hingga 2 Mei 2018 dengan tema “Peran Guru dan Siswa dalam Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Sejarah,” Hilmar Farid, yang akrab dipanggil Fay dan saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud), menyampaikan:

Sejarah memiliki peran sentral dalam menguatkan karakter bangsa. Kepribadian serta identitas nasional bertumpu pada pengalaman kolektif bangsa, yakni pada sejarahnya. Kesadaran sejarah merupakan sumber inspirasi dan apresiasi yang sangat potensial untuk membangkitkan kebanggaan terhadap kebudayaan dan identitas bangsa. ... pengajaran sejarah memiliki peran strategis dalam pendidikan nasional, yakni sebagai tiang penopang (soko guru) dalam pembangunan bangsa (Kemdikbud, 2018a).

Masih pada acara yang sama, Triana Wulandari, Direktur Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud, yang saat itu masih menjabat dan turut hadir dalam pembukaan Lasenas 2018, mengatakan:

Aceh sendiri dipilih sebagai tempat pelaksanaan Lasenas ke-16, karena provinsi ini menjadi bagian penting dari narasi sejarah Indonesia. Aceh telah melahirkan putra-putri terbaik yang turut memberikan sumbangsih dalam mewujudkan percepatan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia (Kemdikbud, 2018b).

Dari kedua pidato tersebut, apabila kita *flashback* dan renungkan. Sebagai pejabat yang memang memiliki *concern* terhadap bidang kesejarahan, ucapan Fay yang mengatakan jika pengalaman kolektif yang didapatkan dari sejarah memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter bangsa menurut peneliti itu memang sudah sangat tepat. Kemudian juga alasan Triana memilih Aceh sebagai lokasi kegiatan karena Aceh merupakan bagian penting dalam narasi sejarah Indonesia, itu juga tak mungkin lagi bisa disanggah. Hal itu mengingat karena narasi tentang sejarah Aceh memang mudah ditemukan dalam buku referensi ataupun buku-buku

teks pembelajaran sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah yang tentunya syarat dengan nilai-nilai dan punya kontribusi dalam pembentukan karakter bangsa.

Sesungguhnya terdapat alasan lain yang juga bisa kita kedepankan mengapa Aceh menjadi tempat pilihan dalam kegiatan Inti Bangsa dan Lasenas serta mengapa narasi sejarah Aceh harus dimasukkan dalam buku teks pembelajaran sejarah Indonesia dan juga perlu untuk dipelajari oleh peserta didik di sekolah. Alasan itu tak lain karena kita tak dapat lagi memungkiri fakta kalau dalam sejarahnya Aceh pernah terlibat dalam beberapa momen penting yang sangat menentukan arah sejarah perjalanan bangsa. Momen penting tersebut tak mungkin dinafikan karena di antaranya pernah menjadi titik balik perubahan serta memiliki dampak yang signifikan terhadap nasib bangsa Indonesia. Berbicara tentang sejarah Indonesia namun tanpa sejarah Aceh sesungguhnya akan mengakibatkan terjadinya diskontinuitas sejarah. Alur cerita sejarah akan terpotong, tidak terjadi koherensi cerita antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, hipotesis kalau sejarah Aceh merupakan bagian penting dalam narasi sejarah Indonesia adalah hipotesis yang tidak dapat lagi dibantah.

Bagi seorang akademisi baik dengan latar belakang sejarah murni ataupun pendidikan sejarah telah memahami betul kalau dimasukkannya narasi tentang sejarah Aceh ke dalam buku teks pembelajaran sejarah Indonesia sesungguhnya bukan sebagai suatu kebetulan. Mereka semua paham jika ada makna serta nilai-nilai ideologis yang terkandung di balik teks yang diproduksi. Hal itu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Mulyana (2013, hlm. 78) bahwa konstruksi penulisan sejarah dalam buku teks menurutnya adalah untuk mengakomodir kepentingan negara dalam mengamalkan nilai dan ideologi pendidikan yang diyakini. Nilai dan ideologi pendidikan yang diyakini negara kemudian berpengaruh terhadap bentuk penafsiran terhadap peristiwa sejarah yang ditulis penulis buku teks yang kapasitasnya mewakili pemerintah selaku pembuat kebijakan pendidikan. Historiografi buku teks sejarah pada akhirnya merupakan sebuah keputusan politis.

Terjadinya ideologisasi serta politisasi pada buku teks sesungguhnya berkorelasi dengan apa yang dikemukakan oleh Apple (2021) soal kurikulum.

Kurikulum yang salah satu instrumen praktisnya adalah buku teks baginya tidak netral dan juga objektif. Melainkan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, kepercayaan dan pandangan dunia yang melekat pada ideologi yang dianut masyarakat dan pemerintahan. Apple melakukan penelitian secara kritis di Amerika Serikat tentang bagaimana pendidikan di sana punya peran penting dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial yang ada. Pada masyarakat kapitalis, sekolah menurutnya adalah tempat untuk melanjutkan dan mereproduksi ketimpangan sosial di masyarakat. Sekolah bisa diibaratkan sebagai arena kuda pacu di mana masyarakat saling berlomba untuk menempatkan diri berada di kelas sosial teratas pada struktur sosial yang memang dianggapnya sudah timpang.

Saat berbicara tentang bagaimana buku teks sejarah itu dikonstruksi, Darmawan dan Mulyana (2016) yang merupakan praktisi pendidikan sejarah berhasil mengidentifikasi tentang adanya dua pendapat yang sama-sama kuat dan bahkan mengakibatkan terjadinya tarik menarik dalam mewarnai dinamika pendidikan sejarah di Indonesia. Pertama, mereka yang berdiri dalam perspektif keilmuan-akademis (peneliti mengidentifikasinya sebagai kelompok para sejarawan dengan latar belakang ilmu sejarah murni). Kedua, mereka yang berdiri di atas nilai-nilai pedagogik (peneliti menyebutnya dengan kelompok sejarawan pendidik, yaitu mereka yang punya latar belakang ilmu sejarah dan juga ilmu kependidikan, kelompok terakhir ini biasanya berkarir di kampus-kampus Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan atau disingkat LPTK). Jika para sejarawan berpendapat kalau sejarah harus disajikan secara objektif, apa adanya, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan sedangkan sejarawan pendidik berpendapat kalau sejarah yang diajarkan haruslah bersifat ideologis, yaitu sejarah yang sudah didekonstruksi atau yang sudah mengalami pemaknaan ulang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan yang ingin ditanamkan yaitu untuk memenuhi tuntutan pendidikan dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan, kebanggaan sebagai anak bangsa.

Dari kedua pendapat tersebut, jika kita mengikuti alur pemikiran sejarawan pendidik dan coba kita relevansikan dalam kaitannya dengan narasi sejarah. Dengan menguatkan argumentasi sebelumnya, buku teks yang merupakan salah satu bagian dari komponen pembelajaran sejarah tentu akan mengandung nilai-

nilai yang bersifat ideologis. Apalagi peredaran buku teks di Indonesia khususnya sejarah diatur resmi oleh pemerintah, tentu narasi sejarah yang dikonstruksi di dalamnya merupakan pesanan negara atau tafsir resmi pemerintah (Supriatna, 2007, hlm. 180).

Subjektivitas yang terjadi dalam penafsiran buku teks pelajaran sejarah sesungguhnya juga merupakan wujud implementasi dari landasan filosofis dan politik pada kurikulum. Penafsiran sejarah yang terdapat dalam kurikulum adalah bentuk dari *official history* yang diciptakan pemerintah. Oleh sebab itu, narasi formal sejarah terkadang berbeda dengan narasi sejarah pinggiran (Nordholt, 2008, hlm. 24-31). Maka dari itu, dengan alasan ideologis-politis, konsep besar tentang penulisan buku teks pelajaran sejarah tidak lepas dari nilai-nilai seperti nasionalisme, patriotisme, multikulturalisme, integrasi nasional, legitimasi kekuasaan yang semuanya memang diciptakan dalam rangka memperkuat eksistensi dan jati diri bangsa.

Pengalaman di negara lain, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakki dan Backman (2019) mengenai pembelajaran sejarah di sepuluh negara Eropa (Austria, Belarus, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Israel, Belanda dan Serbia) juga telah menguatkan hal demikian. Sakki berhasil menemukan jika tujuan pembelajaran sejarah bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis saja namun juga untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan-moralitas dan patriotisme serta membangun kesadaran sejarah (penguatan identitas nasional). Sakki mencontohkan tentang pendidikan sejarah di Ukraina yang menunjukkan pengajaran sejarah digunakan untuk membangun identitas nasional dan mempengaruhi pembentukan perbatasan antar negara, khususnya antara Ukraina dan Rusia. Di Hungaria dan Polandia menurutnya nampak sekali jika pelajaran sejarah digunakan untuk menanamkan ideologi nasionalisme. Hal itu tercermin dari bagaimana negara melakukan kontrol ketat terhadap isi dan gaya buku teks. Di Belanda terungkap terdapat enam tujuan pengajaran yang digambarkan sebagai menghafal, kritis/penjelas, konstruktivis, pengambilan perspektif, moral, dan identitas kolektif. Di Austria, kurikulum sejarah menekankan pembentukan identitas dalam masyarakat pluralistik dan pengembangan keterampilan berpikir mandiri sebagai tujuan utama pendidikan

sejarah. Kurikulum mengakui keragaman di ruang kelas dan multi-perspektif. Mengatasi prasangka, rasisme dan stereotip ditekankan dalam tujuan khusus pendidikan. Di Finlandia fokus kurikulum sejarah adalah pada konstruksi pembelajaran kritis, evaluasi pengetahuan sejarah dan multi-perspektif pengetahuan sejarah. Kurikulum Finlandia menekankan konteks global dan nilai-nilai global dalam pengajaran sejarah. Sesuai dengan kurikulum nasional terbarunya, pengajaran juga harus menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, demokrasi dan kerjasama internasional sebagai strategi untuk mengatasi tantangan sekarang dan di masa depan.

Masih menurut Sakki dan Backman (2019), di negara Perancis secara tradisional menggunakan disiplin sejarah untuk memperkuat kebanggaan dan identitas nasional. Namun sejak awal abad ke-21 lebih banyak perhatian diberikan pada tuntutan berbagai suara dan keragaman dalam pengajaran sejarah. Nilai-nilai humanistik dan kewarganegaraan demokratis menjadi prinsip yang mendominasi dalam kurikulum saat ini disana. Di Italia, kurikulum sejarah menekankan peran Italia sebagai negara dengan warisan sejarah yang penting dan peran penting untuk dimainkan karena posisi geografisnya di Laut Mediterania. Di sisi lain, kurikulum menekankan ruang kelas multikultural saat ini dan pentingnya menggunakan sejarah untuk memahami situasi masa kini. Di Belarus, kurikulum sejarah secara bersamaan menekankan promosi humanisme dan patriotisme, prinsip-prinsip masyarakat sipil dan supremasi hukum, dan warisan budaya dan sejarah rakyat Belarusia. Terakhir, di Serbia pendidikan sejarah telah berpusat pada negara dan digunakan untuk melayani tujuan nasionalis. Pada abad ke-21 iklim ini kemudian diubah secara bertahap dan reformasi pendidikan sedang saat ini sedang dilaksanakan. Reformasi ini menekankan antara lain pertanyaan tentang partisipasi demokratis dan integrasi internasional Serbia.

Berdasarkan argumentasi yang diberikan oleh Sakki dan Backman tersebut, peneliti kemudian bisa menyimpulkan jika gaya penulisan buku teks pembelajaran sejarah di beberapa negara sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh bentuk negara, sistem politik, transisi pemerintahan, kondisi sosial dan budaya masyarakat, cita-cita negara dan pastinya siapa rezim yang sedang berkuasa saat itu. Di negara-negara dengan bentuk dan sistem politik yang totaliter, kekuasaan negara akan

sangat kuat dalam mempengaruhi bentuk narasi pada buku teks. Sedangkan di negara-negara dengan sistem politik yang lebih terbuka, narasi pada buku teks tentu akan cenderung lebih demokratis. Tema-tema sejarah yang diangkat juga akan lebih inklusif, beragam dan tidak selalu *politic oriented*. Walaupun demikian, tetap dimensi ideologis dalam penulisan buku teks pembelajaran sejarah akan tetap nampak. Hal ini bisa dipahami karena *nationalism interest* pada masing-masing negara dalam pendidikan, terutama kaitannya dengan soal kedaulatan dan jati diri bangsa.

Kenyataan sebagaimana yang telah dipaparkan, tampaknya juga terjadi di Indonesia. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, pelajaran sejarah Indonesia juga ternyata diarahkan bukan hanya untuk menambah pengetahuan atau mengasah kemampuan berpikir kritis semata, namun pembelajaran sejarah diharapkan dapat berkontribusi pada penanaman nilai-nilai ideologis kebangsaan serta bisa mewakili karakteristik rezim yang berkuasa. Penelitian yang dilakukan oleh McGregor (2008) setidaknya telah berhasil mengungkap itu. Menurutnya sejarah Indonesia dari masa ke masa selalu digunakan oleh rezim untuk mendukung ideologi negara. Hal itu terjadi mulai dari pemerintahan Soekarno dengan gagasan revolusi belum selesai yang kemudian semakin menguat pada pemerintahan Soeharto dengan gagasan utamanya tentang Pancasila. Selain itu, penelitian McGregor ini juga mengungkap tentang dominannya militer dalam mempengaruhi penulisan sejarah Indonesia sehingga narasi sejarah Indonesia menjadi sangat militeristik pada masa Orde Baru.

Peristiwa sejarah Indonesia yang lebih spesifik dan nyata dalam soal narasi dan pembelajaran sejarah Indonesia yang bersifat ideologis sesungguhnya dapat dicontohkan dalam pembahasan mengenai sejarah integrasi Timor-Timur dan bagaimana mempertahankan Timor-Timur untuk tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembelajaran sejarah saat itu sungguh dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan ideologis yaitu membangun memori kolektif masyarakat, khususnya masyarakat Timor-Timur. Pelajaran sejarah dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan atas tindakan-tindakan yang dilakukan militer. Caranya materi sejarah Timor-Timur versi pemerintah (pro integrasi) dimasukkan pada buku teks

pelajaran sejarah dari jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) sampai dengan pendidikan menengah SMA). Pemerintah Orde Baru pada tahun 1994 bahkan juga menerbitkan buku sejarah khusus untuk diedarkan secara terbatas di sekolah-sekolah di wilayah Timor-Timur dengan harapan bisa memperkuat proses integrasi nasional. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan (SK), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud RI), Nomor: 482/Kep/1992 (Gonggong dan Zuhdi, 1995, hlm. v).

Namun, persoalan kemudian Timor-Timur tetap memisahkan diri dari Indonesia adalah faktor lain yang tentu kita tidak bisa menumpahkan kesalahan sepenuhnya pada narasi buku teks semata. Pasti banyak faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Namun, apabila dianalisis lebih jauh secara kritis, narasi sejarah Timor-Timur yang dikonstruksikan pada buku teks saat itu sesungguhnya hanya berbicara dari sudut pandang Indonesia (kontribusi Indonesia untuk Timor-Timur). Tidak dalam posisi di mana masyarakat Timor-Timur juga berkeinginan dan sekaligus berjuang untuk terus menjadi bagian dari Indonesia (kontribusi Timor-Timur untuk Indonesia). Akibatnya, *sense of belonging* (rasa memiliki) masyarakat Timor-Timur dengan Indonesia menjadi lemah. Padahal, secara kultural dan sosial antara masyarakat Timor-Timur dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki banyak kemiripan. Hanya saja persoalan sejarah tentang siapa yang menjajah ditambah dengan adanya provokasi dan campur tangan dari negara luar, penduduk yang awalnya bersaudara ini akhirnya tercerai-berai.

Aceh sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang pada masa kuno hingga berakhirnya masa kesultanan. Mendeklarasikan diri menjadi bagian dari NKRI dengan berbagai bentuk kontribusinya dari masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Kemudian bergejolak menuntut kemerdekaan dengan munculnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang kemudian bermetamorfosis menjadi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kemudian saat ini kembali lagi damai dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, Finlandia. Dengan berkaca dari berbagai pengalaman negara lain dan juga kasus di Timor-Timur, maka narasi tentang sejarah Aceh yang menjadi salah

satu bagian dalam narasi besar buku teks (akan dijadikan fokus kajian oleh peneliti) pelajaran sejarah Indonesia, tentu tidak akan bebas dari kepentingan (sebenarnya terjadi juga di wilayah yang tak pernah bergejolak sekalipun) dan syarat dengan nilai. Secara tersurat maupun tersirat, ideologi dan kepentingan negara pasti masuk ke dalam narasi-narasi tentang sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia seperti halnya juga Timor-Timur. Secara teoritis, penguatan ideologis dengan cara tersebut sebetulnya hal lumrah yang dilakukan oleh negara-negara yang ingin mempertahankan eksistensi dan keutuhan wilayahnya. Negara memang harus punya andil dalam membangun *collective memory* (memori kolektif) peserta didik kalau mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa.

Sejauh ini kita telah mengakui dan tidak lagi dapat memungkiri jika dalam buku teks sejarah Indonesia, narasi sejarah Aceh memang telah banyak yang terdeskripsikan. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah narasi tentang sejarah Aceh yang terdapat di dalam buku teks yang diedarkan selama ini telah mengakomodir sejarah panjang dan kepentingan masyarakat Aceh secara keseluruhan dalam rangka penguatan identitas kebangsaan? Apakah narasi-narasi mengenai kontribusi Aceh kepada bangsa Indonesia dalam sejarah panjang membangun eksistensi bangsa telah terakomodir dengan baik atau sebaliknya malah mendiskreditkan akibat hubungan pusat-daerah yang dulu sempat berjalan tegang? Peristiwa masa lalu yang tidak tuntas, cacat, atau bahkan disembunyikan akibat kepentingan politik tertentu telah terbukti bisa menjadi batu sandungan dalam rangka proses integrasi bangsa. Sejarah Indonesia harus ditafsirkan dan berperan sebagai pembentuk identitas bangsa. Untuk itu, sekecil apapun kontribusi dan peran daerah dalam pembentukan identitas kebangsaan mesti harus diakui kontribusi dan juga sejarahnya.

Pada era pemerintahan Orde Lama yang kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Orde Baru, sebetulnya pernah ada proyek besar dalam rangka standarisasi materi pengajaran sejarah Indonesia. Proyek ini melibatkan beberapa tokoh sejarawan terkemuka. Hasil dari proyek ini adalah dengan diterbitkannya buku sejarah Indonesia “babon” atau yang dikenal dengan buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang total seluruhnya berjumlah enam jilid. Pasca terbit, buku

yang merupakan hasil kerja gotong royong ini kemudian dijadikan kiblat utama atau buku standar dalam proses penulisan buku teks sejarah Indonesia yang diedarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) No: 0245/U/1976 yang isinya adalah tentang penetapan buku SNI sebagai buku standar baku dalam penulisan buku teks di sekolah.

Apabila ditelusuri secara historis, penetapan buku SNI sebagai buku standar baku sejak awal penyusunan hingga buku ini terbit, ternyata mengundang banyak polemik. Polemik itu dimulai dari perdebatan soal landasan filosofis penulisan sejarah Indonesia yang melibatkan M. Yamin dengan Soedjatmoko yang terjadi pada saat berlangsungnya Seminar Sejarah Nasional I, tanggal 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta. Hingga konflik antara Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirdjo menyangkut isi dari narasi buku SNI yang periodisasi penulisan sejarah pada setiap jilidnya didasarkan pada hasil diskusi panel saat dilangsungkannya Seminar Sejarah Nasional II, tanggal 26-29 Agustus 1970 di Yogyakarta. Kapasitas keduanya pada saat itu adalah sebagai ketua umum dan wakil ketua umum.

Soedjatmoko dalam Seminar Sejarah Nasional I ketika itu mendebat pendapat Yamin soal penulisan sejarah yang harus Indonesiasentris (ideologis). Sedangkan Sartono Kartodirdjo mempersoalkan narasi sejarah di buku SNI jilid VI yang disusun oleh Nugroho Notosusanto selaku penanggung jawab yang menurutnya terlalu militeristik. SNI Jilid VI menurutnya memberikan porsi yang terlalu besar terhadap narasi Angkatan Darat (AD) dalam memberangus PKI serta melebih-lebihkan sosok Soeharto dalam panggung sejarah nasional. Akibat merasa tidak nyaman, Sartono Kartodirdjo kemudian menolak namanya dicantumkan di dalam buku SNI jilid VI tersebut.

Terjadinya penyensoran, mengkambinghitamkan, dan glorifikasi dalam penulisan sejarah memang biasa terjadi ketika sejarah memiliki relevansi langsung dengan rezim yang berkuasa. SNI yang ditulis pada masa Orde Baru sedang berkuasa dan celakanya juga tokoh-tokoh yang dituliskan dalam narasi sejarah masih menduduki posisi strategis dalam kekuasaan, membuat buku SNI ini menjadi subjektif. Buku SNI kemudian terjebak dengan apa yang dikatakan oleh

Perdana Menteri Inggris tahun 1940-1945 Winston Churchill “*history has been written by the victors*” (sejarah selalu ditulis oleh para pemenang). Dengan kondisi itu, tinggal menunggu alarm waktu saja sebetulnya untuk menggugat narasi sejarah pada buku SNI.

Pada masa Reformasi 1998 yaitu sesaat ketika Soeharto tak lagi memegang pucuk kekuasaan tertinggi setelah pengunduran dirinya sebagai presiden. Alarm waktu itu pun akhirnya berbunyi. Muncul sebuah upaya untuk merevisi narasi dan materi pelajaran sejarah yang selama ini mengacu pada narasi besar buku SNI. Antusiasme ini didasarkan atas keraguan publik terhadap kebenaran narasi sejarah yang telah dibangun pemerintahan Soeharto menyangkut beberapa peristiwa sejarah seperti; peristiwa gerakan pemberontakan PKI tahun 1965 (G30S/PKI), Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Karena besarnya desakan publik saat itu, membuat Mendikbud Kabinet Reformasi Prof. Dr. Juwono Sudarsono akhirnya pun bersedia melakukan revisi pembelajaran sejarah termasuk melakukan revisi terhadap buku SNI ini. Agar tak terjadi polemik yang berkepanjangan, Mendikbud dalam waktu singkat akhirnya segera menerbitkan dokumen penyempurnaan/penyesuaian Kurikulum 1994 untuk semua mata pelajaran, termasuk sejarah di dalamnya. Dokumen penyesuaian Kurikulum 1994 ini dikenal dengan sebutan Suplemen GBPP 1999 (Suplemen Garis-Garis Besar Program Pengajaran Tahun 1999).

Namun, garis sejarah kemudian berkata lain. Tidak panjangnya periode masa jabatan Presiden Habibie, membuat Mendikbud Juwono Sudarsono akhirnya tidak mampu menyempurnakan Kurikulum Suplemen GBPP 1999 ini. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, saat jabatan Mendikbud dialihkan kepada Prof. Dr. A. Yahya Muhaimin, pemerintah mencabut dan kembali memberlakukan Kurikulum 1994. Pembelajaran sejarah pun akhirnya kembali terjebak kepada narasi besar buku SNI yang terstandarisasi pada masa Orde Baru. Mirisnya hingga kini, SK Mendikbud No: 0245/U/1976 tentang penetapan buku SNI sebagai buku standar baku dalam penulisan buku teks di sekolah-sekolah yang pernah dikeluarkan tak pernah dicabut. Kemdikbud juga tak pernah menyusun buku standar baru untuk penulisan buku teks sebagai pengganti buku SNI.

Permasalahan yang terjadi pada buku SNI tersebut dan tentu akan merembet pada buku teks mata pelajaran sejarah Indonesia yang beredar di sekolah sebagai buku turunannya, ternyata berdampak di Aceh. Awal cerita ini bersumber dari pengalaman pribadi peneliti saat ditugaskan menjadi guru sejarah SMA di Aceh pada tahun 2017 yang kemudian peneliti manfaatkan dengan banyak berinteraksi ke guru-guru sejarah, dosen, mahasiswa, masyarakat dan *stakeholder*. Ketika panggung wacana nasional dulu pernah ramai berpolemik soal dalang peristiwa G30S/PKI, tokoh utama peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan kebenaran peristiwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Kaum terdidik di Aceh juga ternyata merasa tidak puas dan sampai hari ini masih mempersoalkan narasi sejarah Aceh yang dianggapnya belum tuntas dan mestinya harus diperkuat. Narasi sejarah Aceh yang dimaksud mulai dari janji Soekarno, persoalan kontribusi dan sumbangsih masyarakat Aceh untuk Indonesia (sumbangan emas dan pembelian pesawat Seulawah), peristiwa Radio Rimba di Aceh Tengah, perspektif sejarah soal gerakan DI/TII hingga GAM, persoalan kebijakan pemerintah Indonesia (pusat) yang mereka anggap selama ini terkesan memperlakukan Aceh secara tidak adil dan bahkan cenderung menyudutkan terutama mengenai status otonomi dan keistimewaan Aceh, persoalan pembagian hasil migas, serta proses penyelesaian insiden-insiden berdarah selama Aceh menjadi daerah operasi militer (peristiwa Teungku Bantaqiah dan sebagainya).

Terkait hal tersebut, menurut pandangan mereka semua narasi tersebut tidak tuntas dan bahkan luput dibahas di dalam buku teks. Padahal apabila narasi sejarah Aceh tersebut bisa dideskripsikan secara baik dalam buku teks. Mereka pun meyakini, kerikil-kerikil kecil yang selama ini punya potensi menjadi batu sandungan dalam rangka penguatan identitas kebangsaan di Aceh pasca perdamaian akan tereliminasi dengan baik. Perlu diketahui pula, hingga hari ini masyarakat Aceh masih menyimpan trauma yang mendalam terkait dengan konflik yang berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh mulai dari konflik dengan Belanda hingga pemerintah Indonesia sendiri.

Sebagai wilayah yang problematik di masa lalu, menuliskan dan mengajarkan *difficult history* (peristiwa sejarah yang sulit) di Aceh memang tidak mudah, pastinya diperlukan pendekatan dan perspektif khusus. Bagi peneliti

pendekatan dan perspektif khusus ini perlu segera mendapatkan solusi agar luka di masa lalu bisa menjadi pengalaman berharga yang tidak akan terulang kembali dan bisa saling merugikan antar sesama anak bangsa di masa depan. Narasi pembelajaran sejarah yang dirumuskan, khususnya narasi tentang sejarah Aceh, haruslah narasi yang dapat mempersatukan atau narasi yang sifatnya rekonsiliatif. Pelajaran sejarah harus ikut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan agar bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Aceh pada khususnya bisa menatap pembangunan dan mengejar ketertinggalan dengan optimis demi kehidupan yang lebih baik dan bisa unggul dalam persaingan dunia yang semakin ketat.

Pendekatan khusus atau pendekatan alternatif yang bisa dikedepankan adalah penerapan aspek pembelajaran yang lebih mementingkan terjadinya proses integrasi emosional bangsa. Setelah Orde Lama dan Orde Baru runtuh ditambah dengan adanya kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM. Selesai sudah sebetulnya persoalan integrasi bangsa dengan Aceh tetap memilih untuk menjadi bagian dari NKRI. Namun, persoalan proses integrasi ini tidaklah berhenti dan cukup hanya menyangkut soal geografi, ekonomi, sosial, atau politik saja. Melainkan lebih dalam daripada itu. Integrasi emosional bangsa yang dikedepankan di sini merupakan proses integrasi intelektual yang diimplementasikan melalui jalur pendidikan. Integrasi emosional ini terwujud dalam kecintaan terhadap negara, perasaan gembira terhadap kesejahteraan serta perasaan marah ketika bahaya mengancamnya (Kochhar, 2008, hlm. 471-472).

Buku teks pembelajaran sejarah sesungguhnya memiliki potensi untuk mewujudkan itu. Dengan pengemasan materi yang baik dan menarik serta bisa mengambil jalan tengah dengan mengakomodir berbagai kepentingan. Berimbang dalam menempatkan dan merekonstruksi sebuah peristiwa, tidak merugikan pihak lain. Integrasi emosional nasional yang diharapkan ini sesungguhnya masuk akal dan tidak sulit jika diwujudkan dan diinternalisasikan dalam buku teks dan praktek-praktek pembelajaran sehari-hari di sekolah baik secara formal, non-formal maupun informal.

Atas dasar itulah, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya bentuk narasi tentang sejarah Aceh pada buku teks

pelajaran sejarah masa Orde Baru dan Reformasi (1994-2013) dituliskan. Apakah terdapat perbedaan penulisan narasi sejarah Aceh pada masa Orde Baru yang bersamaan dengan terjadinya peristiwa konflik dengan dengan masa Reformasi atau Aceh pasca perdamaian. Permasalahan tersebut penting diungkap agar temuan dalam penelitian ini bisa memberikan rekomendasi, meminimalisir resistensi bahkan dapat menghilangkan riak-riak kecil yang masih terjadi di Aceh terkait sejarahnya agar perdamaian dan eksistensi bangsa tetap terjaga. Hal itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan sejarah itu sendiri yaitu pengetahuan dan pemahaman dari berbagai peristiwa sejarah yang dimiliki bisa membangun memori kolektif sebagai bangsa dan juga bisa mengembangkan dan memperkuat semangat kebangsaan (Hasan, 2012, hlm. 6).

Adapun alasan mengapa Kurikulum 1994 dipilih sebagai batasan awal waktu pelaksanaan penelitian dan sekaligus dianggap sebagai kurikulum yang bisa merepresentasikan masa Orde Baru karena kurikulum ini berada pada masa transisi penting dalam sejarah Indonesia, yaitu dari akhir era Orde Baru menuju awal Reformasi. Oleh karena itu, kajian terhadap narasi sejarah Aceh dalam Kurikulum 1994 ini tentu akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana pemerintah Orde Baru pada saat itu membingkai sejarah Aceh sebagai alat politik. Dengan menggunakan Kurikulum 1994 sebagai batasan waktu ini pula, peneliti juga dapat lebih mudah mengevaluasi perubahan atau kontinuitas dalam penyajian narasi sejarah Aceh seiring dengan adanya perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia dari masa Orde Baru ke era Reformasi. Sedangkan alasan Kurikulum 2013 dijadikan sebagai batasan akhir waktu penelitian karena Kurikulum 2013 ini adalah produk dari era Reformasi yang ditandai oleh adanya proses demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Peristiwa Reformasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pendidikan, termasuk dalam hal bagaimana sejarah Aceh dikonstruksikan. Dengan mengkaji narasi sejarah Aceh yang disajikan dalam buku teks berdasarkan kurikulum 2013 ini, nantinya kita dapat melihat bagaimana cerminan perubahan di zaman ini. Alasan lainnya, walaupun sama-sama merupakan produk zaman Reformasi, dari sisi pembahasan, narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia di Kurikulum 2013 juga jauh lebih holistik dibandingkan dengan yang ada di Kurikulum KTSP 2006.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan, rumusan masalah yang peneliti coba angkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Narasi Sejarah Aceh pada Buku Teks Pelajaran Sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi?”. Adapun pertanyaan penelitian yang kemudian layak untuk dikedepankan antara lain:

- 1) Bagaimana bentuk narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru yang terdapat di dalam kurikulum 1994?
- 2) Bagaimana bentuk narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Reformasi yang terdapat di dalam kurikulum 2006?
- 3) Bagaimana bentuk narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Reformasi yang terdapat di dalam kurikulum 2013?
- 4) Bagaimana analisis hasil temuan tentang narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi?
- 5) Apa nilai-nilai ideologis yang berhasil teridentifikasi di dalam narasi sejarah Aceh yang terdapat pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian rumusan masalah di atas, berikut ini adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Mampu memberikan contoh bentuk-bentuk narasi sejarah Aceh yang dideskripsikan dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia yang terdapat di dalam kurikulum 1994.
- 2) Mampu memberikan contoh bentuk-bentuk narasi sejarah Aceh yang dideskripsikan dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia yang terdapat di dalam Kurikulum KTSP 2006.
- 3) Mampu memberikan contoh bentuk-bentuk narasi sejarah Aceh yang dideskripsikan dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia yang terdapat di dalam Kurikulum 2013.
- 4) Mampu menganalisis hasil temuan tentang narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi.

- 5) Mampu mengidentifikasi beberapa nilai-nilai ideologis yang dikonstruksikan pada narasi sejarah Aceh yang terdapat didalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis mampu mengungkap tentang landasan filosofis dan politik pendidikan sejarah serta nilai-nilai ideologis yang dipakai untuk menyusun narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia.
- 2) Memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pendidikan sejarah, khususnya tentang bagaimana sesungguhnya bisa mengembangkan sebuah wacana pada buku teks pelajaran sejarah agar sesuai dengan tujuan belajar sejarah yaitu menanamkan nilai-nilai identitas kebangsaan.
- 3) Secara praktis diharapkan mampu memberikan manfaat bagi guru sejarah, penulis buku teks, ataupun pengambil kebijakan tentang bagaimana seharusnya buku teks disusun, bagaimana memanfaatkan buku teks, bagaimana memahami makna tersembunyi di balik buku teks sehingga itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di Indonesia.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Bab 1 Pendahuluan. Terdiri atas beberapa sub bab antara lain latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Di latar belakang penelitian dijelaskan alasan mengapa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Pada bagian rumusan masalah, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan kunci yang menjadi masalah utama yang akan diteliti. Tujuan penelitian menunjukkan hasil dari temuan penelitian. Sedangkan manfaat menggambarkan nilai kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Terakhir, yaitu struktur organisasi tesis yaitu berisi kerangka isi yang terdapat pada masing-masing bab.

Bab II Kajian Kepustakaan. Peneliti menjelaskan beberapa konsep yang relevan dengan tema pokok penelitian yang berfungsi sebagai bahan kajian teoritis

maupun kajian empiris. Adapun konsep-konsep yang dimaksud antara lain: narasi sejarah Aceh, buku teks dan kurikulum. Selain itu pada sub bab selanjutnya peneliti juga memasukkan beberapa karya akademik (kajian literatur) sebagai pedoman ataupun referensi dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Terdapat beberapa sub bab pokok bahasan yang peneliti munculkan antara lain: metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Di metode penelitian, peneliti menjelaskan tentang metode analisis wacana kritis yang dipakai dalam penelitian ini. Pada subjek penelitian, peneliti mencantumkan beberapa buku teks yang dijadikan data utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Kemudian pada sub bab teknik pengumpulan data peneliti menjelaskan tentang proses pengumpulan dan jenis dokumen yang dipakai dalam penelitian ini. Sub bab terakhir adalah teknik analisis data di mana peneliti menyampaikan jika dalam penelitian ini menggunakan metode analisis wacana yang menempatkan narasi buku teks sebagai narasi yang bersifat ideologis, berkepentingan dan tidak bebas nilai.

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Di sini peneliti menguraikan beberapa temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan. Temuan penelitian dipaparkan secara tematik pada setiap sub pokok bahasan.

Bab V Kesimpulan. Berisi tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil temuan penelitian.